



EKALAYA :
Jurnal Ekonomi Akuntansi

Peran Inspektorat Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Siti Adira¹, Cut Aulita Saputri², Arnita Arnita³, Mariana Mariana⁴

Politeknik Negeri Lhokseumawe, Indonesia¹²³⁴

Sitiadira614@gmail.com¹, cutaulitas@gmail.com², arnitaarnita467@gmail.com³, mariana@pnl.ac.id⁴

Diserahkan tanggal 28 Oktober 2024 | Diterima tanggal 23 Desember 2024 | Diterbitkan tanggal 31 Desember 2024

Abstract:

This study aims to analyze the role of regional inspectorates in improving the quality of local government financial management, as well as assess the importance of the awareness of the inspectorate institution in carrying out internal supervision functions to prevent corruption. In addition, this study also explores the effectiveness of the implementation of the Government Internal Control System (SPIP) in ensuring efficient, effective, and compliant regional financial management. The methodology used is literature analysis, with searches through the Google search engine using keywords related to education level and knowledge. A systematic literature review (SLR) is conducted to identify, analyze, and evaluate existing data, as well as to provide guidance for future research. The results of the study show that the role of regional inspectorates is very important in improving the quality of regional financial management through effective supervision and in accordance with the provisions of the law. In addition, the awareness of the inspectorate as an internal auditor is very influential in preventing corruption, because internal auditors must have high integrity. The implementation of SPIP has also proven to be effective in monitoring and ensuring that regional financial management is carried out efficiently and in accordance with applicable regulations. This research contributes to understanding the importance of internal supervision in increasing transparency and accountability of local government financial management.

Keywords: Regional Inspectorate, Financial Management, Internal Supervision, SPIP

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran inspektorat daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, serta menilai pentingnya kesadaran lembaga inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan internal untuk mencegah korupsi. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Metodologi yang digunakan adalah analisis literatur, dengan pencarian melalui mesin pencari Google menggunakan kata kunci terkait tingkat pendidikan dan pengetahuan. Tinjauan literatur sistematis (SLR) dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi data yang ada, serta memberikan panduan untuk penelitian di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran inspektorat daerah sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui pengawasan yang efektif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, kesadaran lembaga inspektorat sebagai auditor internal sangat berpengaruh dalam mencegah korupsi, karena auditor internal harus memiliki integritas yang tinggi. Penerapan SPIP juga terbukti efektif dalam memantau dan memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan efisien dan sesuai aturan yang berlaku. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami pentingnya pengawasan internal dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Inspektorat Daerah, Pengelolaan Keuangan, Pengawasan Internal, SPIP

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Pentingnya akan kesadaran Lembaga inspektorat sebagai Lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan internal (auditor internal) pemerintahan semakin meningkat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik (good governance) merupakan salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintahan daerah. inspektorat daerah sendiri memiliki tugas yaitu menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal (Bolang et al., 2013).

Fungsi auditor internal adalah suatu pemeriksaan untuk melakukan penilaian independent pada sebuah organisasi tersebut. Seorang auditor internal harus memiliki sifat kejujuran, objektif dan professional serta memiliki rasa integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Hal ini dapat mencegah terjadinya korupsi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern pemerintah, atau SPIP, adalah prosedur yang digunakan untuk pengawasan internal pada Tingkat pemerintah pusat dan daerah (Mariana & Rahmaniari, 2022; Munawarah & Diantimala, 2016; Sulistiyanto & Murtini, 2018; Ulfah & Lukiasuti, 2018).

Pemantauan internal adalah prosedur sistematis untuk melacak operasi dan aktivitas berkelanjutan suatu Lembaga atau organisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang bagaimana tujuan suatu Lembaga atau organisasi dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Serta memberikan informasi tentang bagaimana tujuan suatu lembaga atau organisasi dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku (Katili et al., 2017)

Peraturan SPIP berdasarkan PP No. 60 tahun 2008 yaitu proses pengawasan yang dilakukan oleh pejabat dan aparatur untuk menjamin terselenggaranya sistem manajemen yang baik dan benar. Tujuannya adalah untuk merancang strategi untuk mencapai tujuan yang dapat dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan proses. Sejumlah inisiatif pemerintah juga sedang berlangsung serta sedang dilakukan untuk membangun sistem pemerintahan yang baik dan mengembangkan sejumlah undang-undang untuk mencapai tujuan Bersama. Hasilnya, pemerintah melakukan tugas-tugas termasuk evaluasi hasil dan pengawasan pekerjaan. Selain pengawasan internal BPK dan Lembaga inspektorat, kepolisian dan lainnya. Metode pengawasan ini bertujuan untuk mencegah penyelenggara negara menyalahgunakan wewenangnya dengan cara menumbuhkan kebiasaan mengawasi sejumlah koperasi operasi pekerjaan (Mulyani & Suryawati, 2011).

Membangun kondisi yang sehat dan kondusif merupakan salah satu tanggung jawab para pejabat dalam suatu organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menegakkan supremasi hukum, menumbuhkan nilai-nilai moral, menerapkan Teknik kepemimpinan yang efektif, menciptakan struktur organisasi yang didasarkan pada kebutuhan Bersama, menciptakan kebijakan yang tepat, dan membina kerja sama dengan Lembaga terkait. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran inspektorat daerah dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Yunus, 2016).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran inspektorat daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, serta untuk menilai pentingnya kesadaran lembaga inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan internal yang dapat mencegah korupsi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas penerapan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan adalah analisis literatur, yang melihat database dari berbagai sumber, seperti buku, laporan tahunan, jurnal penelitian, jurnal review, dan data pendidikan, pengetahuan. Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan mesin pencari Google, dengan mengetikkan kata kunci sebagai berikut; tingkat pendidikan, dan tingkat pengetahuan (Nufiar et al., 2020, 2022; Rahmatullah et al., 2023; Wahyudi & Mariana, 2024; Zhul et al., 2024). Tinjauan literatur sistematis, atau SLR, adalah sintesis studi literatur yang sistematis, jelas, dan menyeluruh yang mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi data yang ada menggunakan metode pencarian eksplisit dan menyertakan proses tinjauan kritis dalam proses pemilihan studi (Asadi, 2024; Gizelis, 2018; Hendra et al., 2024; Mariana, 2023; Mariana et al., 2024; Maulena et al., 2023). Pendekatan ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam memahami konteks tinjauan literatur, topik yang diteliti, dan alasan di balik serta temuan tinjauan literatur sehingga dapat menjadi panduan untuk penelitian di masa depan.

Hasil dan Pembahasan

Peran dan Fungsi Inspektorat Daerah

Dalam mempertimbangkan fungsi manajemen serta pelaksanaan misi dan program pemerintah, Inspektorat Daerah mempunyai peran dan kedudukan strategis yang sangat kuat. memegang kedudukan yang sebanding dengan fungsi perencanaan atau pelaksanaan dalam hal fungsi manajemen yang mendasar. Sedangkan Inspektorat Daerah merupakan landasan pencapaian visi, tujuan, dan prakarsa pemerintah. Tanggung jawabnya antara lain mengawasi dan melindungi program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sedang berjalan. Peraturan Kebijakan Pemantauan Lingkungan Hidup No. 47 Tahun 2011 oleh Menteri Dalam Negeri. Peran yang ditetapkan Inspektorat daerah kabupaten/Kota pada tahun 2012 pada titik penajaman pengawasan nomor 4.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah (baik urusan wajib maupun pilihan) dengan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Memantau bagaimana operasional pemerintahan desa dijalankan. memegang jabatan dan fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk sebagai aparat pengawas intern pemerintahan daerah. Hal ini dilakukan guna memenuhi visi dan tujuan program dari kedudukannya sama dengan fungsi perencanaan atau pelaksanaan dalam hal fungsi dasar manajemen, namun Inspektorat Daerah merupakan landasan yang bertugas mengawasi dan melindungi pelaksanaan program Pemerintah Daerah yang sesuai dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pemerintah (Senprianthi, 2022)

Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan

Tanggung jawab dapat dipandang sebagai akuntabilitas. Namun jika dihubungkan dengan pengertian akuntansi dan manajemen, terjemahan lugas ini mengaburkan makna tanggung jawab itu sendiri. Lebih lanjut ditegaskan bahwa gagasan akuntabilitas identik dengan pernyataan Stewart bahwa terdapat lima (lima) macam tangga akuntabilitas, antara lain akuntabilitas legalitas dan

probabilitas, akuntabilitas proses, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan (Ermayanti, 2017). Suatu medium akuntabilitas yang dilaksanakan secara periodik sebelumnya menyimpulkan bahwa akuntabilitas dapat dipandang sebagai semacam kewajiban untuk dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas pada hakikatnya adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan mengungkapkan tindakan dan hasil keuangan. Hal ini berarti bahwa untuk memenuhi hak-hak masyarakat—yakni hak untuk mengetahui, hak untuk mendapatkan informasi, dan hak untuk didengarkan keinginannya—pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, harus mampu untuk memberikan kerangka informasi internal (Ika Asmawati & Prayitno Basuki, 2019).

Akuntabilitas bertugas mengawasi implementasi kebijakan dan pengelolaan sumber daya entitas pelapor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara teratur dapat dipahami sebagai tugas untuk menjawab atau memperjelas kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, atau kolektif pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak atau kewenangan untuk meminta keterangan tentang akuntabilitas menjalankan tugas administratifnya. Fenomena ini merupakan dampak dari tuntutan masyarakat yang kembali disadari pada tahun 1998, ketika era reformasi dimulai (Rumapea, 2018).

Kebebasan arus informasi adalah fondasi transparansi; semua lembaga, proses, dan informasi pemerintah harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan; dan informasi yang diberikan harus memadai agar dapat dipahami dan dipantau.” Anggaran eksekutif dianggap transparan jika memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk memiliki anggaran pengumuman kebijakan, dokumen anggaran yang mudah diakses, laporan akuntabilitas tepat waktu, sistem informasi kepada masyarakat, dan ruang bagi suara dan saran masyarakat (Syawaluddin Syawaluddin et al., 2022). Transparansi mencakup penyediaan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan masyarakat atas akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas yang terbuka, aksesibilitas laporan keuangan, publikasi laporan keuangan, hak untuk mengetahui hasil audit, dan ketersediaan informasi kinerja merupakan syarat penyelenggaraan pemerintahan yang transparan. (Ummah, 2019).

Peran Inspektorat dalam Pengawasan Internal

Seperti halnya pemerintah pusat, pengelolaan keuangan daerah melibatkan penyusunan rencana dan pengelolaan anggaran tahun depan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Peraturan Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Menurut daerah, APBD merupakan tempat seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan harus dilacak dan dikendalikan. Pendapatan dan pengeluaran Bidang ini termasuk dalam kerangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Namun APBD tidak melacak arus kas masuk dan keluar terkait dengan pelaksanaan tugas bantuan atau dekonsentrasi (Elbakry et al., 2017).

Dalam satu tahun anggaran, APBD berfungsi sebagai landasan pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pada tahun anggaran tertentu, APBD merupakan rencana pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah secara keseluruhan. Tujuan pengumpulan seluruh pendapatan daerah adalah untuk mencapai tujuan APBD. Begitu pula dengan segala ikatan dan pengeluaran daerah yang membebani internal daerah. Jumlah dan tujuan yang ditetapkan APBD diikuti ketika melaksanakan kerangka desentralisasi. Karena APBD berfungsi sebagai landasan

pengelolaan keuangan daerah, maka APBD juga berfungsi sebagai landasan pelaksanaan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah (Rabbani, 2020).

Operasional pemerintah sangat bergantung pada sistem pengendalian internal. Sistem ini dapat berfungsi jika seluruh aktor pemerintah mempunyai keterampilan, keahlian, dan motivasi untuk mengelolanya secara bersamaan dan berkelanjutan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah hendaknya dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pertanggungjawabannya, secara sistematis, teratur, efektif, dan efisien untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan dan standar penilaian keberhasilan pelaksanaan SPIP, didasarkan pada amanat undang-undang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Inspektorat kabupaten/kota merupakan aparatur pengendalian intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Damayanti & Hermanto, 2018).

Untuk memberikan keyakinan yang cukup terhadap tercapainya tujuan pemerintah melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset daerah, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, diharapkan proses yang penting bagi tindakan dan kegiatan dapat dilakukan. sebenarnya harus dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai. Hal ini sesuai dengan maksud mendasar dari Sistem Pengendalian Intern itu sendiri (Manialup et al., 2017).

Dampak Pengawasan Inspektorat Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan Pasal 308 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pemerintah memberikan pengarahan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah di bawah Menteri Dalam Negeri. Mengenai pengawasan manajemen. Mendukung terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menjamin terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. , diperlukan keuangan daerah, tata pemerintahan yang baik, dan pemerintahan yang bersih. Tersedia tiga metode pengawasan tata kelola yang berbeda: fungsional, komunitas, dan intrinsik. (Efendy 2010; Cahyat, 2004).

Objek pengawasannya, pengawasan terhadap pemerintahan daerah dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pengawasan terhadap produk hukum dan kebijakan daerah, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan produk hukum. dan kebijakan keuangan di tingkat regional. Pengawasan keuangan merupakan tanggung jawab utama inspektorat daerah. Penyelenggaraan APBD, penerimaan pendapatan daerah dan Badan Usaha Daerah, pembelian dan pemeliharaan/pembuangan barang dan jasa, penyelidikan dan evaluasi Surat Pemberitahuan Pajak Orang Pribadi, pembayaran imbalan, serta inventarisasi dan penyidikan harta kekayaan pejabat. Itulah beberapa contoh kewenangan daerah yang terlibat dalam pengawasan keuangan dan aset daerah.

Evaluasi Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah

Agar pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat akuntabel, transparan, dan efisien, maka efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah sangatlah penting. Efektivitas pengawasan yang tinggi

dapat mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi dan pencurian keuangan di wilayah tersebut. Terlaksananya tata kelola daerah yang kuat sangat bergantung pada seberapa baik pengawasan internal Inspektorat Daerah berjalan. Tujuan pengawasan pemerintah daerah adalah untuk menjamin seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan fungsi publik dapat melaksanakannya secara efektif dan efisien. Namun dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam pengawasan Inspektorat Daerah. Selain kurang berintegritas dan kompeten, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum benar-benar otonom, dan jumlah personel aparat pengawas yang dibutuhkan belum tercapai. Selain itu, Inspektorat Daerah mempunyai sejumlah tanggung jawab pusat yang diperlukan, termasuk menindaklanjuti Pusat Pengawasan Pencegahan (MCP) (KPK) Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi membuat aplikasi MCP untuk melacak efektivitas program yang bertujuan mencegah korupsi dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan (Marlaini et al., 2019).

SIMPULAN

Inspektorat daerah memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sebagai instansi yang bertugas membantu kepala daerah, inspektorat memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan peran yang baik dan efektif, inspektorat dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga menghasilkan akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran.

Kesadaran akan pentingnya inspektorat sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan internal (auditor internal) semakin meningkat. Seorang auditor internal dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi serta sifat kejujuran, objektivitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Dengan menjalankan prinsip-prinsip tersebut, inspektorat dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah terjadinya korupsi dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) menjadi salah satu prosedur penting dalam mendukung pengawasan internal baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Melalui SPIP, inspektorat dapat melakukan pemantauan yang sistematis terhadap operasi dan aktivitas organisasi. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien, dengan tetap mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Dengan penerapan SPIP yang baik, pengelolaan keuangan dapat berjalan sesuai standar, meningkatkan kualitas pelaporan, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asadi, F. (2024). Studi Literatur Regulasi dan Etika Artificial Intelligence (AI) dalam Kebijakan Kedokteran Presisi (Precision Medicine). *Jurnal Fasikom*, 14(1), 59–65. <https://doi.org/10.37859/jf.v14i1.6836>
- Bolang, M. S., Sondakh, J. J., & Morasa, J. (2013). Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Pengalaman Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota Tomohon Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Accountability*, 2(1), 151. <https://doi.org/10.32400/ja.2352.2.1.2013.151-163>

- Damayanti, E., & Hermanto, S. B. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(3), 1–21.
- Elbakry, A. E., Nwachukwu, J. C., & Abdou, H. A. (2017). Journal of International Accounting , Auditing and Taxation Comparative evidence on the value relevance of IFRS-based accounting information in Germany and the UK. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 2(8), 10–30. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2016.12.002>
- Ermayanti, D. (2017). Pengaruh Emotional Quotient, Pengalaman Auditor Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 178–190. <https://doi.org/10.26533/eksis.v12i2.109>
- Gizelis, T.-I. (2018). Systematic Study of Gender, Conflict, and Peace. *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, 24(4). <https://doi.org/10.1515/peps-2018-0038>
- Hendra, A., Nufiar, N., & Mariana, M. (2024). Pengelolaan Dana Infaq ASN Kabupaten Pidie. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 11–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.194>
- Ika Asmawati, & Prayitno Basuki. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- Katili, M., Nangoi, G., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Auditor pada Inspektorat Provinsi dan Kabupaten Kota Gorontalo. *Jurnal EMB A*, 5(2), 572–582.
- Manialup, A. W., Nangoi, G. B., & Morasa, J. (2017). Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 20–29. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17164>
- Mariana, M. (2023). Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; Kasus Kabupaten Pidie. *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 108–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.214>
- Mariana, M., & Rahmaniar, R. (2022). Pengaruh Motivasi dan Independensi Auditor Terhadap Kinerja Auditor. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 76–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v1i2.74>
- Mariana, M., Ramadani, D., Kheriah, K., & Hamdani, H. (2024). Dampak Implementasi Sistem e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Lhokseumawe. *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 1(2), 33–40. <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/jiel/article/view/1185>
- Marlaini, M., Aliamin, A., & Indriani, M. (2019). Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Paradigma Baru (Studi Kasus Pada Salah Satu Inspektorat Di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(1), 95–108. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i1.10926>
- Maulena, M., Kheriah, K., & Abral, E. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Lhokseumawe. *Ekalaya : Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(4), 81–89. www.depkeu.com
- Mulyani, P., & Suryawati, R. F. (2011). Analisis Peran Dan Fungsi Sistem Pengendalian Intern

- Pemerintah (Spip/Pp No.60 Tahun 2008) Dalam Meminimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 7(2), 102–116. <https://doi.org/10.33830/jom.v7i2.95.2011>
- Munawarah, H., & Diantimala, Y. (2016). Pengaruh Motivasi, Diskusi Dalam Reviu Audit, Kompleksitas Tugas, Dan Tekanan Waktu Terhadap Kinerja Auditor (Studi Pada Inspektorat Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 33–44.
- Nufiar, Mariana, & Muhammad Ali. (2020). Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District did Sharia. *Journal of Social Science*, 1(4), 147–151. <https://doi.org/10.46799/jsss.v1i4.55>
- Nufiar, Rahmad, Safriadi, & Mariana. (2022). Determination Of The Cost Maintenance Of Pawned Goods In Islamic Law The Perspective. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(3), 1561–1570. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-002107>
- Rabbani, D. R. S. (2020). PUBLIC TRUST BUILDING STRATEGY TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH: TELAHAH PROSES REFOCUSING DAN REALOKASI APBD (ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH) DALAM UPAYA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 Deden. *LEGISLATIF: Lembaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif Dan Inovatif*, 4(1), 59–78.
- Rahmatullah, I., Mariana, M., & Armia, A. (2023). Peningkatan Margin Keuntungan: Praktik Efektif Jual Beli Bahan Bangunan. *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 101–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.212>
- Rumapea, C. R. S. (2018). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Due Professional Care, Akuntabilitas, Dan Fraud Risk Assessment Aparat Inspektorat Terhadap Kualitas Audit Dalam Mewujudkan Good Governance Di Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 1, 74–93.
- Senprianthi, S. (2022). Analisis Kendala Peran Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.22146/abis.v10i1.73336>
- Sulistiyanto, F., & Murtini, H. (2018). Determinants of Internal Auditor Performance through Knowledge Management with Organizational Culture as Moderating. *AAJ: Accounting Analysis Journal*, 7(3), 183–191. <https://doi.org/10.15294/aaj.v7i3.22631>
- Syawaluddin Syawaluddin, Afrah Junita, & Iqlima Azhar. (2022). Systematic Literatur Review: Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan, Temuan Inspektorat Dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 1(1), 153–162. <https://doi.org/10.55606/mri.v1i1.644>
- Ulfah, U. M., & Lukiastuti, F. (2018). Pengaruh Kompetensi dan Independensi pada Kinerja Auditor Internal Pemerintah dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Tegal). *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan | Journal of Theory and Applied Management*, 11(1), 39. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v11i1.7620>
- Ummah, M. S. (2019). Faktor pendukung dan faktor penghambat Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang akuntabel Dalam. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.

- Wahyudi, W., & Mariana, M. (2024). Mengadaikan Kembali Tanah Gadai. *Jurnal Tahqiqq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(2), 88–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/tahqiqq.v18i2.228>
- Yunus, N. R. (2016). Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia. *NUR EL-ISLAM Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 3(1), 143–175.
- Zhul, F., Mariana, M., & Armia, A. (2024). Unsur Gharar dalam Pemberian Voucher Promo Shopee. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 47–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.197>
- Asadi, F. (2024). Studi Literatur Regulasi dan Etika Artificial Intelligence (AI) dalam Kebijakan Kedokteran Presisi (Precision Medicine). *Jurnal Fasilkom*, 14(1), 59–65. <https://doi.org/10.37859/jf.v14i1.6836>
- Bolang, M. S., Sondakh, J. J., & Morasa, J. (2013). Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Pengalaman Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota Tomohon Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Accountability*, 2(1), 151. <https://doi.org/10.32400/ja.2352.2.1.2013.151-163>
- Damayanti, E., & Hermanto, S. B. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(3), 1–21.
- Elbakry, A. E., Nwachukwu, J. C., & Abdou, H. A. (2017). Journal of International Accounting , Auditing and Taxation Comparative evidence on the value relevance of IFRS-based accounting information in Germany and the UK. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 2(8), 10–30. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2016.12.002>
- Ermayanti, D. (2017). Pengaruh Emotional Quotient, Pengalaman Auditor Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 178–190. <https://doi.org/10.26533/eksis.v12i2.109>
- Gizelis, T.-I. (2018). Systematic Study of Gender, Conflict, and Peace. *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, 24(4). <https://doi.org/10.1515/peps-2018-0038>
- Hendra, A., Nufiar, N., & Mariana, M. (2024). Pengelolaan Dana Infaq ASN Kabupaten Pidie. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 11–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.194>
- Ika Asmawati, & Prayitno Basuki. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- Katili, M., Nangoi, G., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Auditor pada Inspektorat Provinsi dan Kabupaten Kota Gorontalo. *Jurnal EMBA*, 5(2), 572–582.
- Manialup, A. W., Nangoi, G. B., & Morasa, J. (2017). Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 20–29. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17164>
- Mariana, M. (2023). Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; Kasus Kabupaten Pidie. *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 108–115.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.214>
- Mariana, M., & Rahmaniari, R. (2022). Pengaruh Motivasi dan Independensi Auditor Terhadap Kinerja Auditor. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 76–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v1i2.74>
- Mariana, M., Ramadani, D., Kheriah, K., & Hamdani, H. (2024). Dampak Implementasi Sistem e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Lhokseumawe. *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 1(2), 33–40. <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/jiel/article/view/1185>
- Marlaini, M., Aliamin, A., & Indriani, M. (2019). Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Paradigma Baru (Studi Kasus Pada Salah Satu Inspektorat Di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(1), 95–108. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i1.10926>
- Maulena, M., Kheriah, K., & Abral, E. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Lhokseumawe. *Ekalaya : Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(4), 81–89. www.depkeu.com
- Mulyani, P., & Suryawati, R. F. (2011). Analisis Peran Dan Fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip/Pp No.60 Tahun 2008) Dalam Meminimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 7(2), 102–116. <https://doi.org/10.33830/jom.v7i2.95.2011>
- Munawarah, H., & Diantimala, Y. (2016). Pengaruh Motivasi, Diskusi Dalam Reviu Audit, Kompleksitas Tugas, Dan Tekanan Waktu Terhadap Kinerja Auditor (Studi Pada Inspektorat Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 33–44.
- Nufiar, Mariana, & Muhammad Ali. (2020). Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District did Sharia. *Journal of Social Science*, 1(4), 147–151. <https://doi.org/10.46799/jsss.v1i4.55>
- Nufiar, Rahmad, Safriadi, & Mariana. (2022). Determination Of The Cost Maintenance Of Pawned Goods In Islamic Law The Perspective. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(3), 1561–1570. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-002107>
- Rabbani, D. R. S. (2020). PUBLIC TRUST BUILDING STRATEGY TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH: TELAHAH PROSES REFOCUSING DAN REALOKASI APBD (ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH) DALAM UPAYA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 Deden. *LEGISLATIF: Lembaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif Dan Inovatif*, 4(1), 59–78.
- Rahmatullah, I., Mariana, M., & Armia, A. (2023). Peningkatan Margin Keuntungan: Praktik Efektif Jual Beli Bahan Bangunan. *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 101–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.212>
- Rumapea, C. R. S. (2018). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Due Professional Care, Akuntabilitas, Dan Fraud Risk Assessment Aparat Inspektorat Terhadap Kualitas Audit Dalam Mewujudkan Good Governance Di Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 1, 74–93.
- Senprianthi, S. (2022). Analisis Kendala Peran Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi

- Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.22146/abis.v10i1.73336>
- Sulistiyanto, F., & Murtini, H. (2018). Determinants of Internal Auditor Performance through Knowledge Management with Organizational Culture as Moderating. *AAJ: Accounting Analysis Journal*, 7(3), 183–191. <https://doi.org/10.15294/aaj.v7i3.22631>
- Syawaluddin Syawaluddin, Afrah Junita, & Iqlima Azhar. (2022). Systematic Literatur Review: Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan, Temuan Inspektorat Dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 1(1), 153–162. <https://doi.org/10.55606/mri.v1i1.644>
- Ulfah, U. M., & Lukiastuti, F. (2018). Pengaruh Kompetensi dan Independensi pada Kinerja Auditor Internal Pemerintah dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Tegal). *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan | Journal of Theory and Applied Management*, 11(1), 39. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v11i1.7620>
- Ummah, M. S. (2019). Faktor pendukung dan faktor penghambat Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang akuntabel Dalam. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Wahyudi, W., & Mariana, M. (2024). Mengadaikan Kembali Tanah Gadai. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(2), 88–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i2.228>
- Yunus, N. R. (2016). Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia. *NUR EL-ISLAM Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 3(1), 143–175.
- Zhul, F., Mariana, M., & Armia, A. (2024). Unsur Gharar dalam Pemberian Voucher Promo Shopee. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 47–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.197>
- Asadi, F. (2024). Studi Literatur Regulasi dan Etika Artificial Intelligence (AI) dalam Kebijakan Kedokteran Presisi (Precision Medicine). *Jurnal Fasilkom*, 14(1), 59–65. <https://doi.org/10.37859/jf.v14i1.6836>
- Bolang, M. S., Sondakh, J. J., & Morasa, J. (2013). Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Pengalaman Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota Tomohon Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Accountability*, 2(1), 151. <https://doi.org/10.32400/ja.2352.2.1.2013.151-163>
- Damayanti, E., & Hermanto, S. B. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(3), 1–21.
- Elbakry, A. E., Nwachukwu, J. C., & Abdou, H. A. (2017). Journal of International Accounting , Auditing and Taxation Comparative evidence on the value relevance of IFRS-based accounting information in Germany and the UK. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 2(8), 10–30. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2016.12.002>
- Ermayanti, D. (2017). Pengaruh Emotional Quotient, Pengalaman Auditor Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 178–190. <https://doi.org/10.26533/eksis.v12i2.109>

- Gizelis, T.-I. (2018). Systematic Study of Gender, Conflict, and Peace. *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, 24(4). <https://doi.org/10.1515/peps-2018-0038>
- Hendra, A., Nufiar, N., & Mariana, M. (2024). Pengelolaan Dana Infaq ASN Kabupaten Pidie. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 11–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.194>
- Ika Asmawati, & Prayitno Basuki. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- Katili, M., Nangoi, G., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Auditor pada Inspektorat Provinsi dan Kabupaten Kota Gorontalo. *Jurnal EMB A*, 5(2), 572–582.
- Manialup, A. W., Nangoi, G. B., & Morasa, J. (2017). Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 20–29. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17164>
- Mariana, M. (2023). Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; Kasus Kabupaten Pidie. *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 108–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.214>
- Mariana, M., & Rahmaniar, R. (2022). Pengaruh Motivasi dan Independensi Auditor Terhadap Kinerja Auditor. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 76–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v1i2.74>
- Mariana, M., Ramadani, D., Kheriah, K., & Hamdani, H. (2024). Dampak Implementasi Sistem e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Lhokseumawe. *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 1(2), 33–40. <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/jiel/article/view/1185>
- Marlaini, M., Aliamin, A., & Indriani, M. (2019). Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Paradigma Baru (Studi Kasus Pada Salah Satu Inspektorat Di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(1), 95–108. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i1.10926>
- Maulena, M., Kheriah, K., & Abral, E. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Lhokseumawe. *Ekalaya : Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(4), 81–89. www.depkeu.com
- Mulyani, P., & Suryawati, R. F. (2011). Analisis Peran Dan Fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip/Pp No.60 Tahun 2008) Dalam Meminimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 7(2), 102–116. <https://doi.org/10.33830/jom.v7i2.95.2011>
- Munawarah, H., & Diantimala, Y. (2016). Pengaruh Motivasi, Diskusi Dalam Reviu Audit, Kompleksitas Tugas, Dan Tekanan Waktu Terhadap Kinerja Auditor (Studi Pada Inspektorat Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 33–44.
- Nufiar, Mariana, & Muhammad Ali. (2020). Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District did Sharia. *Journal of Social Science*, 1(4), 147–151. <https://doi.org/10.46799/jsss.v1i4.55>

- Nufiar, Rahmad, Safriadi, & Mariana. (2022). Determination Of The Cost Maintenance Of Powned Goods In Islamic Law The Perspective. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(3), 1561–1570. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-002107>
- Rabbani, D. R. S. (2020). PUBLIC TRUST BUILDING STRATEGY TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH: TELAAH PROSES REFOCUSING DAN REALOKASI APBD (ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH) DALAM UPAYA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 Deden. *LEGISLATIF: Lembaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif Dan Inovatif*, 4(1), 59–78.
- Rahmatullah, I., Mariana, M., & Armia, A. (2023). Peningkatan Margin Keuntungan: Praktik Efektif Jual Beli Bahan Bangunan. *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 101–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.212>
- Rumapea, C. R. S. (2018). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Due Professional Care, Akuntabilitas, Dan Fraud Risk Assessment Aparat Inspektorat Terhadap Kualitas Audit Dalam Mewujudkan Good Governance Di Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 1, 74–93.
- Senprianthi, S. (2022). Analisis Kendala Peran Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.22146/abis.v10i1.73336>
- Sulistiyanto, F., & Murtini, H. (2018). Determinants of Internal Auditor Performance through Knowledge Management with Organizational Culture as Moderating. *AAJ: Accounting Analysis Journal*, 7(3), 183–191. <https://doi.org/10.15294/aaj.v7i3.22631>
- Syawaluddin Syawaluddin, Afrah Junita, & Iqlima Azhar. (2022). Systematic Literatur Review: Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan, Temuan Inspektorat Dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 1(1), 153–162. <https://doi.org/10.55606/mri.v1i1.644>
- Ulfah, U. M., & Lukiastuti, F. (2018). Pengaruh Kompetensi dan Independensi pada Kinerja Auditor Internal Pemerintah dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Tegal). *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan | Journal of Theory and Applied Management*, 11(1), 39. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v11i1.7620>
- Ummah, M. S. (2019). Faktor pendukung dan faktor penghambat Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang akuntabel Dalam. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Wahyudi, W., & Mariana, M. (2024). Mengadaikan Kembali Tanah Gadai. *Jurnal Tabqqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(2), 88–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/tahqqa.v18i2.228>
- Yunus, N. R. (2016). Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia. *NUR EL-ISLAM Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 3(1), 143–175.
- Zhul, F., Mariana, M., & Armia, A. (2024). Unsur Gharar dalam Pemberian Voucher Promo Shopee. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 47–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.197>